

LAPORAN KINERJA

**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016**



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016. Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja BPS Provinsi Sulawesi Tengah atas pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan laporan ini adalah mengevaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran BPS Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2016.

Dalam laporan ini tertuang capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja BPS Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2016, perkembangan realisasi kinerja terhadap tahun sebelumnya, serta capaian kinerja terhadap target Rencana Strategis (Renstra) BPS Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016. Hasil laporan ini diharapkan menjadi alat kendali dan bahan masukan untuk evaluasi pencapaian kinerja yang lebih optimal di tahun mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini. Kritik dan saran yang membangun sangat kami hargai untuk peningkatan kualitas dan perbaikan di masa mendatang.

Palu, Maret 2017
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah



Faizal Anwar

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 disusun sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Provinsi Sulawesi Tengah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja juga merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, telah ditetapkan 3 (tiga) tujuan yang harus dicapai BPS Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam Renstra BPS Provinsi Sulawesi Tengah 2015-2019 yaitu: 1) Peningkatan kualitas data statistik, 2) Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, dan 3) Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel.

Secara umum kinerja BPS Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016 dapat dikatakan memuaskan bila dilihat dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 101,99 persen. Tetapi bila dilihat dari rata-rata capaian kinerja tujuan yang hanya 99,27 persen, perlu upaya maksimal untuk melakukan perbaikan, baik dari sisi perencanaan target maupun sisi pelaksanaan. Misi BPS Provinsi Sulawesi Tengah untuk menghasilkan data yang berkualitas tercermin dari meningkatnya kepuasan konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama. Demikian juga keinginan untuk meningkatkan pelayanan prima atas hasil kegiatan statistik, juga tercermin dari semakin meningkatnya kepuasan konsumen atas layanan data BPS. Capaian kinerja untuk tujuan peningkatan birokrasi yang akuntabel terjadi penurunan terhadap akuntabilitas keuangan yang tercermin dari menurunnya opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK dari WTP menjadi WDP.

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dari program dan kegiatan yang diusulkan, pada TA 2016 BPS Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan pagu sebesar Rp 14,182 miliar dengan realisasi sebesar Rp 12,859 rupiah (90,67 persen) dan pagu setelah selfblocking sebesar 12,988 miliar dengan realisasi 99,01 persen. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan maupun sasaran strategis dapat dikatakan BPS Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan efisiensi penggunaan anggaran. Hal yang sama terjadi pada pelaksanaan seluruh program dan kegiatan BPS Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada era reformasi dan birokrasi yang pada hakikatnya melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan telah membawa BPS dalam situasi perubahan tersebut. BPS sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, terus mengalami perkembangan baik dari aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumberdaya manusia. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.

Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peranan yang harus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut:

- >> Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survei yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder,
- >> Membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional,
- >> Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik,
- >> Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.

Lembaga Pemerintah yang anggarannya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maka BPS Provinsi Sulawesi Tengah wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pemangku Kepentingan. Laporan Kinerja disusun mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

SAKIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah akuntabel, dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; mewujudkan transparansi pada instansi pemerintah; mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; dan memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini dimungkinkan karena dengan menerapkan SAKIP, setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang secara sistematis akan mengarahkan instansi pemerintah dalam pencapaian tujuannya, pelaksanaan tupoksinya sampai dengan pertanggungjawaban atas hasil kerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban BPS Provinsi Sulawesi Tengah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dan juga Rencana Strategis tahun 2015-2019. Laporan ini juga digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja BPS Provinsi Sulawesi Tengah di masa yang akan datang.

1.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi BPS

Tugas BPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik adalah menyelenggarakan statistik dasar. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik mengatur lebih lanjut bahwa tugas BPS adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, BPS menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian, penyusunan, dan perumusan kebijakan dibidang statistik;
- b. Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional;
- c. Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar;
- d. Penetapan sistem statistik nasional;
- e. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang kegiatan statistik; dan
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan, dan rumah tangga.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, kewenangan yang dimiliki BPS adalah:

- a. Penyusunan rencana daerah secara makro dibidang statistik;
- b. Perumusan kebijakan dibidang statistik untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. Penetapan sistem informasi dibidang statistik;
- d. Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional di daerah;

- e. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu dibidang kegiatan statistik; serta Penyusunan pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral.

Susunan organisasi BPS Provinsi berdasarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS dan diperbaharui dengan Peraturan Kepala BPS Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BPS Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS, terdiri dari:

- a. Kepala
- b. Bagian Tata Usaha
- c. Bidang Statistik Sosial
- d. Bidang Statistik Produksi
- e. Bidang Statistik Distribusi
- f. Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
- g. Tenaga Fungsional

1.2 Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran

Dalam mengemban tugas dan fungsinya, BPS Provinsi Sulawesi Tengah perlu didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Kualitas SDM BPS Provinsi Sulawesi Tengah relatif baik. Dari total 60 pegawai, persentase SDM yang berpendidikan DIII ke atas sebesar 83,33 persen dengan rincian: DIII sebesar 5 persen, DIV/S1 sebesar 53,33 persen, dan yang berpendidikan S2 sebesar 25 persen. Peningkatan kapasitas SDM melalui jalur pendidikan terus dilakukan, selain mendidik calon pegawai melalui Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) yang merupakan sekolah kedinasan milik BPS di Jakarta, peningkatan juga dilakukan melalui aktivitas Rintisan Pendidikan Gelar dengan cara memberi kesempatan kepada pegawai untuk menempuh pendidikan tingkat S2 dan S3 melalui jalur Tugas Belajar, serta memberikan ijin belajar bagi pegawai yang memilih sekolah jalur mandiri.

Selain dari sisi pendidikan, peran jabatan fungsional juga semakin ditingkatkan. Tercatat sebanyak 44 pegawai BPS Provinsi Sulawesi Tengah dan BPS Kabupaten/Kota atau sebesar 13,84 persen dari total jumlah pegawai menduduki jabatan fungsional statistisi, dengan rincian 52,27 persen pegawai merupakan statistisi tingkat terampil dan 47,73 persen merupakan statistisi tingkat ahli

Dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya, BPS Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh anggaran tahun 2016 dengan pagu sebesar Rp 14,182 miliar. Pagu tersebut dibagi kedalam satu program teknis yaitu Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) sebesar Rp 4,445 miliar dan dua Program non teknis yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) sebesar Rp 8,442 miliar, dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA) sebesar Rp 1,295 juta. Rincian Pagu anggaran BPS Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016 menurut program dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pagu Anggaran BPS Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Program Tahun Anggaran 2016 (Rupiah)

Program	Anggaran
(1)	(2)
01 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL)	Rp. 8.442.271.000,-
02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA)	Rp. 1.295.020.000,-
03 Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	Rp. 4.445.594.000,-
Total	Rp. 14.182.885.000,-

1.3 Potensi dan Permasalahan

BPS merupakan *National Statistics Office* (NSO) yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sebagaimana NSO Negara lainnya BPS selalu berpedoman kepada *Fundamental Principles of Official Statistic* diantaranya selalu mengacu kepada standar internasional di dalam menerapkan klasifikasi, metode dan konsep statistik. Standar ini juga menjadi acuan BPS daerah dalam melaksanakan kegiatan perstatistikan.

BPS dalam menyelenggarakan kegiatan perstatistikan telah memiliki payung hukum yang mengatur baik dari sisi organisasi, SDM maupun dari sisi tugas, fungsi dan kewenangannya. Hal tersebut menjadi kekuatan bagi BPS untuk mengembangkan kegiatan perstatistikan kedepannya

Secara kelembagaan BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota sebagai instansi vertikal merupakan bagian integral dari BPS RI secara keseluruhan yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007. Perpres tersebut menjamin koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik dasar di pusat maupun di daerah.

Peranan data statistik sangat penting dalam bidang perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional. Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, masyarakat menginginkan agar data dapat tersedia lebih cepat (*faster*), dapat diperoleh lebih mudah (*easier*), lebih berkualitas (*better*) dan lebih murah (*cheaper*). Hal tersebut menjadi fokus utama BPS Provinsi Sulawesi Tengah untuk menyediakan data secara lebih cepat, akurat, dan dapat diakses publik dengan mudah melalui *website* BPS Provinsi Sulawesi Tengah (sulteng.bps.go.id).

Potensi BPS dalam teknologi informasi (TI) dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kegiatan statistik baik dari sisi pengumpulan, pengelolaan maupun diseminasi. Pemanfaatan TI di BPS Provinsi Sulawesi Tengah telah menyentuh segala unit baik teknis maupun administrasi. Sebagian pengembangan TI merupakan produk BPS RI, dan sebagian lainnya merupakan karya pegawai BPS Provinsi Sulawesi Tengah, diantaranya pengembangan aplikasi Sistem Informasi Monitoring Distribusi (SIMODIS) terkait laporan pemasukan dokumen/progress penyelesaian kegiatan statistik distribusi.

BPS Provinsi Sulawesi Tengah telah mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal, Jumlah SDM di BPS Provinsi Sulawesi Tengah sudah memadai dengan tingkat pendidikan yang cukup baik, tetapi masih perlu ditingkatkan dari sisi kedisiplinan dan pengembangan kualitas. SDM BPS Provinsi Sulawesi Tengah memiliki keahlian dan pengalaman dibidang Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, bidang Pertanian, Teknik dan Hukum, keahlian statistik ekonomi, statistik sosial, komputasi, dan sebagainya.

Dari sisi eksternal, sebagian responden enggan untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan oleh BPS. Hal tersebut menjadi salah satu kendala untuk memperoleh data yang berkualitas, mengingat kegiatan statistik yang dilakukan BPS adalah statistik yang bersifat pengakuan, dan bukan pengukuran. Keakuratan pengakuan dari sumber data menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kualitas data statistik.

Data BPS telah banyak digunakan oleh berbagai pihak dalam hal perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Bahkan tiap bulannya *release* data BPS dinanti-nanti oleh banyak pihak, terutama para ekonom. BPS juga gencar melakukan sosialisasi, agar masyarakat lebih mengenal BPS. Harapannya ketika mereka menjadi responden sensus/survei BPS bisa lebih kooperatif dalam memberikan jawabannya.

1.4 Sistematika Penyajian Laporan

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja BPS tahun 2016 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I. **Pendahuluan**, pada bab ini disajikan latar belakang; kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPS Provinsi Sulawesi Tengah ; sumber daya manusia dan dukungan anggaran BPS Provinsi Sulawesi Tengah, potensi dan permasalahan yang dihadapi BPS Provinsi Sulawesi Tengah; serta sistematika penyajian laporan.
- Bab II. **Perencanaan Kinerja**, pada bab ini berisi Rencana Strategis (Renstra) BPS Provinsi Sulawesi Tengah 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) BPS Provinsi Sulawesi Tengah 2016.
- Bab III. **Akuntabilitas Kinerja**, pada bab ini berisi Capaian Kinerja BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Capaian Kinerja BPS Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Target Renstra 2016 dan 2019, Prestasi tahun 2016, Upaya Efisiensi BPS Provinsi Sulawesi Tengah 2016, dan Realisasi Anggaran tahun 2016.
- Bab IV. **Penutup**, pada bab ini berisi tinjauan umum dan tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (Renstra) BPS Provinsi Sulawesi Tengah 2015 -2019

Dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 yakni **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**, Visi yang disusun BPS untuk mewujudkan kontribusi tersebut sebagaimana tercantum dalam Renstra 2015-2019 adalah:

“ Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua ”

“Pelopor” mempunyai makna bahwa BPS sebagai pencetus ide penyedia statistik terpercaya, sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan statistik terpercaya. “Data statistik yang terpercaya” yaitu statistik yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. “Untuk semua” dimaksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengakses data BPS (*impartial*) baik pengguna data nasional maupun internasional. Eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. Visi tersebut dicapai dengan misi sebagai berikut:

1 Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional

“Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas baik bagi pemerintah maupun masyarakat” (Perpres No.86 tahun 2007). Berkualitas berarti data statistik yang dihasilkan BPS memenuhi dimensi kualitas yakni relevan, akurat, disajikan tepat waktu, koheren, dapat diakses, dan dapat diinterpretasikan.

Kata terintegrasi bermakna bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik perlu lebih mengedepankan pendekatan fungsional, serta mengurangi pelaksanaan yang bersifat terkotak-kotak (*silo thinking*). Pendekatan fungsional berarti alur proses dari pengumpulan data, pengolahan data hingga diseminasi data dilakukan secara terintegrasi antar *subject matter*. Terintegrasi juga berarti penyelenggaraan statistik yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan statistik, serta menghindari terjadinya duplikasi kegiatan (UU No. 16 Tahun 1997).

Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS akan selalu berpedoman kepada konsep, standar, dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam *Fundamental Principle of Official Statistics*.

2 Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik

“Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus menerus dan berkelanjutan” (UU No. 16 Tahun 1997). Di dalam undang-undang tersebut, BPS memiliki mandat untuk melakukan pembinaan terhadap instansi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. BPS juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.

Dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik (PP No.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik). Dalam melakukan pembinaan statistik, BPS dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swasta, dan atau unsur masyarakat lainnya. Upaya pembinaan statistik yang dilakukan BPS sesuai PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, meliputi:

1. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik;
2. Pengembangan statistik sebagai ilmu;
3. Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik;
4. Perwujudan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam kerangka semangat kerjasama dengan para penyelenggara kegiatan statistik lainnya;
5. Pengembangan sistem informasi statistik;
6. Peningkatan penyebarluasan informasi statistik;
7. Peningkatan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk mendukung pembangunan nasional;
8. Peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik.

Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

1. Pelaksanaan kegiatan statistik;
2. Pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.

Koordinasi dan atau kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat dilaksanakan atas dasar prinsip kemitraan. Koordinasi dan/atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik dilakukan dalam rangka membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional. Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik mencakup perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan/atau analisis statistik.

3 **Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan**

Pembangunan insan statistik dilakukan untuk mewujudkan pengejawantahan nilai-nilai organisasi Badan Pusat Statistik, yakni profesional, berintegritas, dan amanah. Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas.

Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu memiliki sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur). Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran didalam melaksanakan kegiatan statistik

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi BPS 2015-2019, maka ditetapkan tujuan yang harus dicapai. Masing-masing tujuan memiliki sasaran strategis pencapaian. Sasaran strategis dari masing-masing tujuan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Provinsi Sulawesi Tengah 2015 – 2019

Tujuan	Sasaran Strategis
(1)	(2)
T1. Peningkatan kualitas data statistik	SS1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS
	SS2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (<i>respondent engagement</i>)
T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	SS3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>user engagement</i>)
T3. Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel	SS4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS
	SS5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

Masing-masing tujuan dan sasaran strategis pada tabel di atas memiliki indikator yang terukur agar dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaiannya.

2.2 Perjanjian Kinerja (PK) BPS Provinsi Sulawesi Tengah 2016

BPS Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan target dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai selama setahun melalui dokumen Perjanjian Kinerja. Sehubungan dengan adanya surat dari Kementerian Keuangan Nomor S-522/MK.02/2016 perihal perubahan PAGU Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P TA 2016 dan Surat Kementerian Keuangan tentang Penghematan/Pemotongan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga (KL) TA 2016 berdampak pada target kinerja BPS termasuk BPS daerah. Hal ini disebabkan banyaknya aktivitas kegiatan statistik yang dihentikan yang secara langsung berdampak pada pencapaian kinerja BPS. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 10 Oktober 2016 ditandatangani Reviu Perjanjian Kinerja.

Perubahan Target Kinerja BPS Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Target Kinerja BPS Provinsi Sulawesi Tengah 2016

Tujuan/Sasaran/Indikator	Satuan	Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Peningkatan kualitas data statistik			
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	90	90
1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS			
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	90	90
Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Persen	80	80
Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	Persen	100	100
Jumlah <i>Release</i> data Statistik yang tepat waktu	Aktivitas	68	70
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik yang terbit tepat waktu	Publikasi	23	33
Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu	Publikasi	2	2
1.2 Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (<i>respondent engagement</i>)			
Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan rumah tangga	Persen	100	100
Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan usaha	Persen	100	100
Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	Persen	100	100

2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik				
	Persentase Konsumen yang puas akan pelayanan data BPS	Persen	90	90
2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>user engagement</i>)				
	Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS	Persen	90	90
	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i>	Pengunjung	40.000	40.000
	Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	22,75	22,75
	Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS	Persen	90	90
	Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	Persen	90	90
3. Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel				
	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	70	70
3.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS				
	Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	Persen	80	71,43
	Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I	Persen	75	75,47
3.2 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS				
	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	70	70

Realisasi dari target perjanjian kinerja tersebut dimonitoring setiap triwulanan, kemudian dilaporkan menjadi laporan interim (triwulanan) dan pada akhir tahun dilaporkan menjadi laporan kinerja. Keberhasilan/ kegagalan pencapaian target menjadi tanggung jawab Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah selaku penggunaan anggaran BPS Provinsi Sulawesi Tengah.

Perjanjian Kinerja yang disusun selanjutnya diturunkan ke dalam perjanjian kinerja pada tingkat unit kerja Eselon III dan Eselon IV. Karena itu setiap unit kerja mempunyai kontribusi terhadap penyusunan target kinerja BPS. Peranan unit kerja Eselon III pada setiap penyusunan target indikator dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Kontribusi Unit Kerja di BPS Provinsi Sulawesi Tengah Terhadap Penyusunan Target Indikator

Tujuan/Sasaran/Indikator	TU	Sos	Dist	Prod	Ner	IPDS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Peningkatan kualitas data statistik						
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik		V	V	V	V	V
1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS						
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik		V	V	V	V	V
Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama		V	V	V	V	V
Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS						V
Jumlah <i>Release</i> data Statistik yang tepat waktu		V	V	V	V	V
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik yang terbit tepat waktu	V	V	V	V	V	V
Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu		V	V	V	V	V
1.2 Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (<i>respondent engagement</i>)						
Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan rumah tangga		V	V	V	V	V
Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan usaha		V	V	V	V	V
Persentase pemasukan dokumen		V	V	V	V	V

	(<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha						
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik							
	Persentase Konsumen yang puas akan pelayanan data BPS	V	V	V	V	V	V
2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>user engagement</i>)							
	Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS	V	V	V	V	V	V
	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i>		V	V	V	V	V
	Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional		V	V	V	V	V
	Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS	V	V	V	V	V	V
	Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	V					
3. Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel							
	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	V					
3.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS							
	Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	V					
	Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I	V					
3.2 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS							
	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	V	V	V	V	V	V

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Capaian kinerja BPS Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016 merupakan pencapaian dari indikator-indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis selama tahun 2016. Pengukuran capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target indikator kinerja pada masing-masing tujuan maupun sasaran. Indikator kinerja yang dimaksud merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki target pada Perjanjian Kinerja 2016 serta data realisasinya dapat diperoleh.

Tabel 5. Rata-rata Capaian Kinerja BPS Provinsi Sulawesi Tengah menurut Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2016

Tujuan/Sasaran/Indikator		Jumlah Indikator	Capaian Kinerja (%)
(1)		(2)	(3)
1	Peningkatan kualitas data statistik	1	100,5
1.1	Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	6	100,8
1.2	Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (<i>respondent engagement</i>)	3	99,9
2	Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	1	103,7
2.1	Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>user engagement</i>)	5	103,7
3	Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel	1	99,7
3.1	Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS	2	100,0
3.2	Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	1	99,4
Rata-rata Tujuan			99,27
Rata-rata Sasaran			101,29

Hasil pengukuran menunjukkan Kinerja BPS pada tahun 2016 untuk sasaran mencapai 101,29 persen, sedangkan untuk tujuan hanya 99,27 persen. Jika dibandingkan tahun 2015, baik capaian kinerja tujuan maupun sasaran, keduanya mengalami penurunan. Pada tahun 2015 capaian kinerja BPS Provinsi Sulawesi Tengah untuk tujuan mencapai 104,13 persen sedangkan untuk sasaran 102,08 persen.

Tujuan 1 >> Peningkatan Kualitas Data Statistik

Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat. Pengguna data menginginkan data bisa tersedia lebih cepat (*faster*), lebih murah (*cheaper*), lebih mudah diperoleh (*easier*), dan lebih berkualitas (*better*). Upaya pengembangan yang dilakukan BPS sampai saat ini telah menghasilkan beragam data dan indikator sosial-ekonomi. Meskipun demikian, data yang dihasilkan BPS tidak jarang mendapat kritik karena dinilai tidak mencerminkan realitas di lapangan. Pro dan kontra mengenai data BPS mengindikasikan bahwa kualitas data BPS masih perlu ditingkatkan. Agar kualitas data BPS semakin meningkat maka peran kerangka penjaminan kualitas dalam penyelenggaraan kegiatan statistik semakin ditingkatkan

Keberhasilan tujuan BPS dalam aspek kualitas data diukur melalui satu IKU yaitu persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik. Pengukuran indikator tersebut dilakukan melalui Survei Kebutuhan Data (SKD). Hasil SKD menunjukkan bahwa 83,4 persen konsumen merasa puas terhadap kualitas data statistik yang dihasilkan BPS Provinsi Sulawesi Tengah. Jika dibandingkan dengan target sebesar 90 persen, kinerja BPS Provinsi Sulawesi Tengah untuk tujuan pertama tercapai dengan nilai capaian sebesar 92,7 persen. Selanjutnya jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, konsumen yang merasa puas sebesar 91,19 persen.

Pada tujuan pertama, sasaran strategis yang harus dicapai meliputi 2 sasaran, dengan penjelasan sebagai berikut:

SS1. Meningkatnya Kepercayaan Pengguna Data terhadap kualitas data BPS

SS1. diukur melalui 6 (enam) IKU. Sasaran ini dapat dikatakan tercapai dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,8 persen. Target dan pencapaian tahun 2016 serta perbandingan terhadap realisasi tahun 2015 pada masing-masing IKU dapat dilihat pada Tabel 6

Tabel 6 Capaian Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya Kepercayaan Pengguna Data terhadap Kualitas Data BPS Tahun 2016

IKU	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%)	Realisasi 2015	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	90	83,4	92,7	91,19	-7,79
Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	80	94,3	117,9	77,5	16,8
Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	100	100	100	100	0
Jumlah <i>Release</i> data Statistik yang tepat waktu	70	69	94,1	71	-2
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik yang terbit tepat waktu	33	33	100	36	-3
Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu	2	2	100	9	-7
Rata-rata Capaian Kinerja			100,8		

Indikator “Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik” selain merupakan indikator dari tujuan pertama, juga merupakan indikator pertama dari SS1. Berikut penjelasan capaian kinerja dan perubahannya dibanding tahun 2015 dari IKU lainnya pada SS1.

Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS

Salah satu syarat utama untuk menyelenggarakan kegiatan survei yang baik adalah tersedianya kerangka sampel yang lengkap, akurat, relevan, mutakhir, dan berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan pemeliharaan kerangka sampel secara berkelanjutan dengan cara melakukan pemutakhiran baik dari sisi muatan blok sensus maupun dari sisi perubahan wilayah. Muatan blok sensus yang dimutakhirkan selain jumlah rumah tangga, juga informasi tentang beberapa variabel rumah tangga yang diperlukan untuk kepentingan survei. Sedangkan perubahan wilayah mencakup perubahan batas, nama, dan kode dari suatu wilayah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan blok sensus.

Hingga akhir tahun 2016 pemutakhiran data Master File Desa (MFD) dan Master Blok Sensus (MBS) di Provinsi Sulawesi Tengah telah dilakukan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Persentase Konsumen yang selalu Menjadikan Data dan Informasi Statistik BPS Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Rujukan Utama

Sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang bertugas menghasilkan data statistik, sudah sewajarnya jika masyarakat menjadikan BPS sebagai rujukan utama dalam mencari informasi statistik. Hal tersebut tercermin dari hasil SKD yang menunjukkan sebanyak 94,3 persen konsumen menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama. Dengan demikian capaian kinerja BPS untuk indikator tersebut mencapai 117,9 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 yang sebesar 77,5 persen, maka terjadi kenaikan sebesar 16,8 persen

Jumlah Publikasi/Laporan Statistik yang Terbit Tepat Waktu & Jumlah Rilis Data Statistik yang Tepat Waktu

Dalam rangka menyampaikan informasi dan data statistik yang dihasilkan oleh BPS Provinsi Riau secara tepat kepada para pengguna data, maka perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui program *Advance Release Calendar* (ARC). Program ini menyediakan informasi jadwal penerbitan semua produk BPS Provinsi Riau yang di dalamnya mencakup periodisitas dan tenggang waktu yang ditayangkan dalam *website* BPS Provinsi Sulawesi Tengah (sulteng.bps.go.id).

Maksud dan tujuan penyusunan ARC BPS Provinsi Sulawesi Tengah antara lain:

1. Menjamin terwujudnya seri publikasi BPS Provinsi Sulawesi Tengah yang berkesinambungan, dengan frekuensi penerbitan yang terjadwal dengan baik agar lebih akuntabel dan tidak bersifat *ad hoc*.
2. Mengontrol agar publikasi BPS Provinsi Riau dapat diterbitkan secara konsisten dan *Subject Matter* terkait dapat memenuhi jadwal penerbitan sesuai dengan yang direncanakan.
3. Memberikan informasi kepada publik (pengguna data BPS) mengenai publikasi apa saja yang akan diterbitkan, melalui tayangan dalam *website* BPS Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Memberikan kepastian pada publik (pengguna data BPS) mengenai ketersediaan data dan periodisitas data BPS Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas setiap unit kerja di lingkungan BPS Provinsi Riau, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan program ARC BPS.

ARC BPS menurut jenisnya dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu ARC Publikasi dan ARC Berita Resmi Statistik (BRS). Sebagaimana pada tujuan Program ARC kelima maka data pada ARC menjadi rujukan untuk mengukur 2 (dua) IKU BPS yaitu “Jumlah Publikasi/Laporan Statistik yang terbit tepat waktu” dan “Jumlah Rilis data Statistik yang tepat waktu”. Sebanyak 24 publikasi ditargetkan terbit sesuai jadwal pada tahun 2016, dan semuanya dapat dipenuhi, selain 24 publikasi tersebut BPS Provinsi Sulawesi Tengah dalam Perjanjian Kinerja 2016 juga membuat target laporan lainnya seperti Laporan Keuangan, Laporan BMN, dsb

Pada awal tahun 2016 ditargetkan *release* data statistik sebanyak 70 kali, pada pelaksanaannya *release* data diselenggarakan sebanyak 69 kali dengan kata lain capaian kinerja indikator “Jumlah *release* data statistik yang tepat waktu” sebesar 94,1 persen. Dengan realisasi sebesar itu dapatlah dikatakan BPS Provinsi Sulawesi Tengah sudah dapat memberikan kepastian mengenai ketersediaan data dan periodisitas data BPS Provinsi Sulawesi Tengah kepada publik dalam bentuk Berita Resmi Statistik. Meskipun perlu digali lagi agar pengukuran *release* data tidak sekedar terselenggara saja melainkan juga jenis atau variabel data yang dirilis. Untuk informasi yang lebih lengkap, daftar publikasi yang diterbitkan serta data yang di *release* pada tahun 2016 dapat dilihat pada Lampiran

SS2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (*respondent engagement*)

Berbagai permasalahan yang dihadapi BPS Provinsi Sulawesi Tengah saat ini memungkinkan beberapa data dan informasi statistik yang dihasilkan dinilai kurang berkualitas, sehingga para pengguna data kurang puas terhadap produk BPS secara keseluruhan. Salah satu penyebabnya adalah adanya kecenderungan masyarakat menjadi enggan dan menolak untuk menjadi responden BPS (non respon), terutama untuk masyarakat yang tinggal di kawasan elit dan responden perusahaan. Non respon merupakan salah satu masalah dalam survei maupun sensus yang dapat mengakibatkan bias non respon dalam estimasi survei.

Non respon unit adalah hasil dari kegagalan dalam memperoleh respon pada semua item kuesioner dari unit-unit sampel. Adanya bias non respon merupakan ancaman terhadap validitas dan reliabilitas suatu penelitian, terutama bila tingkat non responnya cukup tinggi. Untuk itu, SS2. dimaksudkan untuk mengatasi masalah tersebut.

Berbagai upaya dilakukan BPS Provinsi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan *response rate* kegiatan survei melalui kegiatan pelatihan maupun publisitas. Pengukuran keberhasilannya diwakili oleh 3 (tiga) IKU dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 99,9 persen. Data dan penjelasan capaian dari masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel 7 dan penjelasan dibawah ini

Tabel 7. Capaian Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (*respondent engagement*) Tahun 2016

IKU	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%)	Realisasi 2015	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan rumah tangga	100	100	100	99	1
Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan usaha	100	99,8	99,8	99	0,8
Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	100	100	100	99	1
Rata-rata Capaian Kinerja			99,9		

Target pemasukan dokumen untuk survei dengan pendekatan usaha pada tahun 2016 sebesar 100 persen. Dengan realisasi sebesar 99,8 persen, capaian kinerja untuk indikator tersebut sebesar 99,9 persen. Terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, terjadi peningkatan sebesar 0,9 persen.

Tujuan 2 >> Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik

Sebagai salah satu agen pemerintah yang ditugaskan untuk mengumpulkan data makro dan data mikro, BPS mempunyai konsumen utama berupa Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan dunia usaha serta masyarakat. Berbagai pendekatan dan sistem telah diterapkan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima untuk pengguna data statistik tanpa membedakan (diskriminatif) terhadap semua pihak. Peningkatan kualitas pelayanan mencakup penyempurnaan metadata, pembangunan *data warehouse*, penyempurnaan pelayanan statistik, pembuatan *advanced release calendar (ARC)*, dan pengembangan perpustakaan sesuai situasi daerah. Selain itu, BPS Provinsi Sulawesi Tengah juga terus menyempurnakan situs *website* BPS Provinsi Sulawesi Tengah dan menambah muatan data yang di *upload* supaya pengguna data dapat memperoleh data yang diperlukan dengan mudah, cepat, dan murah.

Pengukuran pencapaian BPS dalam rangka mencapai tujuan “Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik,” dinilai melalui satu indikator yaitu “Persentase Konsumen yang puas akan layanan data BPS”. Sebagaimana indikator sebelumnya yang terkait dengan konsumen, untuk mendapatkan besaran datanya diperoleh melalui SKD.

Hasil SKD menunjukkan persentase konsumen yang puas akan layanan data BPS Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2016 mencapai 95,5 persen, naik 6,54 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 yang mencapai 88,96 persen. Capaian kinerja BPS untuk IKU tersebut sebesar 103,7 persen.

Tujuan kedua dicapai melalui satu sasaran strategis yaitu **SS3. “Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (*user engagement*)”**, dengan pengukuran keberhasilannya dinilai oleh empat IKU. Pada tahun 2016 kinerja sasaran tersebut belum sepenuhnya berhasil dicapai dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 103,7 persen. Data dan penjelasan keberhasilan/kegagalan pencapaian masing-masing indikator dari sasaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 8 dan penjelasan di bawah ini.

Tabel 8. Capaian Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatkan kualitas hubungan dengan pengguna data (*user engagement*) Tahun 2016

IKU	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%)	Realisasi 2015	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS	90	95,5	106,1	88,96	6,54
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i>	40.000	43.243	134	38.559	4.684
Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	22,8	15,5	68,3	-	-

Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS	90	94,1	104,5	90,53	3,57
Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	90	95	105,5	85,47	9,53
Rata-rata Capaian Kinerja			103,7		

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui *website*

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui *website* pada tahun 2016 mencapai lebih dari 43 ribu pengunjung, lebih besar dari target PK yang sebanyak 40 ribu pengunjung. Angka ini juga lebih tinggi dari realisasi tahun 2015 yang mencapai lebih dari 38 ribu pengunjung. Perlu diinformasikan *website* yang dimaksud hanya untuk *website* sulteng.bps.go.id, konsumen yang mengunjungi *website* selain yang disebutkan tidak dimasukkan dalam penghitungan kinerja

Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menimbang bahwa statistik penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan. Untuk mengukur keberhasilan BPS terhadap apa yang tercantum dalam undang-undang, maka pada tahun 2016 dilakukan reviu terhadap Renstra BPS tahun 2015-2019 dengan menambahkan satu indikator yaitu persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.

Sebagaimana indikator yang berkaitan dengan konsumen BPS, data indikator tersebut diperoleh melalui SKD. Pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 22,8 persen konsumen menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional, namun hasil SKD menunjukkan realisasinya hanya sebesar 15,5 persen.

Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS

Salah satu cara untuk mencapai tujuan peningkatan pelayanan prima adalah dengan meningkatkan kapasitas akses data bagi konsumen. Dengan peningkatan kapasitas, diharapkan konsumen memperoleh data yang diperlukan dengan mudah, cepat, dan murah. Keberhasilan BPS dalam meningkatkan kapasitas akses data dapat diukur melalui IKU “Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS”.

Hasil SKD menunjukkan jumlah konsumen yang puas terhadap akses data BPS Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 94,1 persen, lebih besar bila dibandingkan target PK yang sebesar 90 persen. Angka ini juga lebih tinggi dari realisasi tahun 2015 yang hanya mencapai lebih dari 90,53 persen

Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS

Sarana dan prasarana yang baik merupakan salah satu komponen dalam pelayanan. Oleh sebab itu SKD memasukkan komponen tersebut dalam daftar pertanyaan pada kuesioner SKD. Pertanyaan tersebut selanjutnya dihitung untuk mendapatkan capaian IKU yang juga merupakan salah satu Indikator kinerja keberhasilan Program PSPA BPS.

Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS pada tahun 2016 mencapai 95 persen. Angka ini tinggi bila dibandingkan dengan target tahun 2016 yang besarnya sama dengan realisasi tahun 2015 dengan persentase konsumen yang merasa puas sebesar 85,47 persen

Tujuan 3 >> **Peningkatan Penyelenggaraan/Pelaksanaan Birokrasi yang Akuntabel**

Salah satu hal yang menjadi inti dari reformasi birokrasi adalah akuntabilitas instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang akuntabel semakin penting keberadaannya mengingat semakin tingginya ekspektasi dan tuntutan masyarakat atas pelayanan pemerintah. BPS sebagai lembaga Negara juga harus meningkatkan akuntabilitasnya sebagaimana yang tertera pada Tujuan 3 Renstra BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019. Akuntabilitas dimaksud tidak hanya dari sisi keuangan saja, meskipun dari sisi tersebut mutlak diperlukan melainkan juga dari sisi kinerja. Dengan penguatan akuntabilitas ini, diharapkan akan memberi efek peningkatan kinerja yang pada gilirannya akan menghasilkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Setiap Tahun Inspektorat BPS selalu melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan di tiap BPS Daerah. Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk memeriksa kewajaran penyajian LK BPS berdasarkan:

- >> Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- >> Kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP;
- >> Efektivitas sistem pengendalian intern; dan
- >> Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

SS4. Meningkatnya kualitas pembinaan SDM BPS

Agar pelayanan prima dapat diwujudkan maka diperlukan SDM yang berkualitas dan profesional. Oleh sebab itu pembinaan SDM diperlukan agar pegawai semakin meningkat kualitasnya mengingat kualitas SDM merupakan kunci utama yang dapat mengubah berbagai kelemahan menjadi kekuatan serta mengubah tantangan menjadi peluang. Pembinaan SDM merupakan suatu keharusan karena masyarakat mengharapkan hadirnya pemerintahan yang lebih tinggi kualitasnya dan lebih mampu mengemban fungsi-fungsi pelayanan publik. Sasaran “Meningkatnya kualitas pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik” diukur keberhasilannya melalui dua IKU. Rata-rata capaian kinerja ini pada tahun 2016 mencapai 100 persen. Penjelasan tentang capaian masing-masing IKU dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 9. Capaian Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik Tahun 2016

IKU	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%)	Realisasi 2015	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	71,4	71,4	100	31,65	39,75
Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I	75,5	75,5	100	78,53	-2,8
Rata-rata Capaian Kinerja			100		

Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu

Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Dalam rangka mencapai tujuan nasional, dibutuhkan adanya PNS dengan mutu profesionalisme yang memadai, berdayaguna, dan berhasilguna didalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. PNS perlu dibina dengan sebaik-baiknya atas dasar sistem karier dan sistem prestasi kerja.

Persentase pegawai BPS Provinsi Sulawesi Tengah yang menduduki jabatan fungsional statistisi pada tahun 2016 sebesar 71,4 persen, sesuai dengan target yang ditentukan. Kedepan BPS perlu memperbanyak jumlah pegawai yang menduduki jabatan fungsional agar data semakin berkualitas dan pelayanan prima terus meningkat.

Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I

Selain pembinaan pada pegawai yang menduduki jabatan fungsional, kompetensi pegawai dapat ditingkatkan melalui pendidikan. Sebagaimana dijelaskan pada bab pendahuluan bahwa peningkatan kapasitas SDM melalui jalur pendidikan terus dilakukan baik melalui STIS maupun melalui aktivitas Rintisan Pendidikan Gelar dengan cara memberi kesempatan kepada pegawai untuk menempuh pendidikan tingkat DIV/S1, S2 dan S3 melalui jalur Tugas Belajar. Pada tahun 2016 persentasenya pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I sebesar 75,5 persen.

SS5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa bukan hanya akuntabilitas keuangan saja yang perlu diperhatikan, melainkan juga akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja paling tidak memberi manfaat kepada masyarakat yang ingin mengetahui seberapa besar efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan setiap kegiatan publik oleh pemerintah, yang dibiayai oleh uang rakyat. Dengan melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja maka BPS Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan telah memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi BPS. Indikator Kinerja Utama untuk mengukur sasaran ini adalah Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat.

Tabel 10. Capaian Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS Tahun 2016

IKU	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%)	Realisasi 2015	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	70	69,3	99	67,33	1,97
Rata-rata Capaian Kinerja			99		

Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat BPS

BPS Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun ke tahun selalu berupaya memperbaiki Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) hingga tingkat kabupaten/kota. Disisi lain juga telah melakukan reuiu IKU menyesuaikan dengan Perka BPS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BPS Nomor 3 Tahun 2015 tentang Indikator Utama Badan Pusat Statistik, yang kemudian diikuti dengan reuiu Renstra BPS Provinsi Sulawesi Tengah 2015-2019 dan Reuiu Perjanjian Kinerja 2016

Realisasi Anggaran Tahun 2016

Pada tahun anggaran 2016 pagu akhir BPS Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp 14,182 miliar dengan komposisi terdiri dari 45,7 persen belanja pegawai, 45,17 persen belanja barang dan 9,13 persen belanja Modal. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya BPS melakukan *self blocking* terhadap pagu BPS Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp 1,194 miliar sehingga total pagu yang dapat digunakan sebesar Rp 12,988 miliar. Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan BPS Provinsi Sulawesi Tengah menggunakan anggaran sebesar Rp 12,859 miliar dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp 6,432 miliar, belanja barang sebesar 5,160 miliar dan belanja Modal sebesar 1,266 miliar. Jika dibandingkan dengan pagu yang diterima, realisasi anggaran BPS pada tahun 2016 mencapai 90,67 persen, adapun Jika dibandingkan dengan pagu yang telah dikurangi *self blocking* maka realisasi anggaran BPS sebesar 99 persen.

Tabel 14. Pagu dan Realisasi Anggaran BPS Menurut Program dan Sumber dana Tahun 2016 (Ribu Rupiah)

Program/ Sumber Dana	Pagu	Realisasi	Self Bloking	Pagu- Self Bloking	Realisasi/ Pagu (%)	Realisasi/ Pagu- Self Bloking (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
DMPTTL	8.442.271	8.387.791	-	8.442.271	99,35	99,35
PSPA	1.295.020	1.266.361	28.000	1.267.020	97,79	99,95
P2IS	4.445.594	3.205.235	1.116.508	3.279.086	72,10	97,75
Total	14.182.885	12.859.387	1.194.508	12.988.377	90,67	99,01

BAB IV

PENUTUP

Arus globalisasi dan semakin terbukanya berbagai informasi tidak mengurangi kuatnya tantangan dan hambatan yang dihadapi BPS. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul agar BPS Provinsi Sulawesi Tengah tetap dapat menghasilkan data yang berkualitas serta pelayanan yang prima kepada pengguna data. Hal tersebut tercermin dari tercapainya tujuan BPS Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Rencana Strategis BPS Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2015-2019.

Kinerja BPS Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2016 dapat dikatakan cukup memuaskan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 99,27 persendian capaian kinerja sasaran sebesar 101,64 persen. Dari sisi pengguna data, hasil SKD menunjukkan tingkat kepuasan yang cukup tinggi pada kualitas dan layanan data BPS, walaupun masih cukup rendah penggunaan data BPS Provinsi Sulawesi Tengah untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Walaupun dari sisi lain masih terdapat beberapa kekurangan terkait tidak tercapainya target beberapa IKU. Selain itu pencapaian pada tahun depan juga harus ditingkatkan. Peningkatan bukan saja berupa bertambahnya realisasi kinerja namun dapat berupa penajaman indikator maupun target kinerja. Langkah-langkah dalam rangka peningkatan kinerja antara lain:

Penajaman Target Kinerja

Beberapa pengukuran indikator yang terkait dengan kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS dan kualitas hubungan dengan pengguna data diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Data (SKD), realisasinya melampaui target, namun ada indikator yang masih di bawah target, maka perlu dilakukan penajaman (peningkatan) target kinerja. Penajaman diharapkan menjadi pendorong bagi BPS Provinsi Sulawesi Tengah untuk berkinerja jauh lebih baik

Penajaman IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU) BPS Provinsi ditetapkan oleh Kepala BPS RI. Agar pengukuran keberhasilan tujuan dan sasaran BPS Provinsi menjadi lebih relevan, perlu dilakukan penajaman terhadap beberapa IKU, terutama IKU yang terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM). Pembinaan SDM di BPS masih terpusat, sehingga kewenangan BPS Provinsi masih terbatas, dan hal ini perlu dipertegas dalam IKU BPS Provinsi.

Pembinaan perlu dilakukan secara terus menerus agar SDM BPS tetap memenuhi standar kompetensi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu sebagai lembaga yang ditugaskan untuk membina jabatan fungsional statistisi dan pranata komputer, kinerja BPS dalam rangka pemenuhan kebutuhan jabatan tersebut di seluruh instansi pemerintah juga harus terukur.